



CALK

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SABU RAIJUA**

TAHUN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan El Tari - Seba

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Format Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan melakukan konversi/penyesuaian realisasi APBD dalam format berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana; dan
- b) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Entitas Akuntansi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Sabu Raijua diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 12);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu

- Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 2);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 4);
 30. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014 Nomor 5);
 31. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014 Nomor 6);
 32. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 54);
 33. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 35);
 34. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 40).

1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua disajikan dengan sistematika terdiri atas enam bab yaitu:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua

- 2.1. Ekonomi Makro (Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua)
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/hambatan Pencapaian Target
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasar Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasar Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Belanja
 - 5.1.2. Surplus/Defisit
 - 5.2. Laporan Operasional (LO)
 - 5.2.1. Beban
 - 5.2.2. Surplus/Defisit Operasi
 - 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4. Neraca
 - 5.4.1. Aset
 - 5.4.2. Kewajiban
 - 5.4.3. Ekuitas
- BAB VI Penjelasan Atas Informasi–informasi non keuangan
- Penutup.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SABU RAIJUA

2.1. Ekonomi Makro (Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua)

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sabu Raijua, dan mempunyai susunan organisasi yang terdiri:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum membawahi:
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
- c. Bagian Keuangan
- d. Bagian Risalah dan Persidangan

Didukung oleh aparatur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dengan data sebagai berikut:

No. Urut	Jabatan	Pendidikan terakhir				Jumlah
		S2	S1	D3	SMA/SMK	
1	Eselon II	0	1	0	0	1
2	Eselon III	0	3	0	0	3
3	Eselon IV	0	1	0	0	3
4	Fungsional	0	2	0	0	2
5	Staf	1	6	1	1	9
6	PPPK	0	1	0	0	1
7	Tenaga Kontrak	0	0	0	19	19
Jumlah		1	14	1	20	36

2.2. Kebijakan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, maka dalam menyusun anggaran tahun 2024 di Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua lebih mengarahkan pada kegiatan yang perlu dan mendesak untuk dilakukan. Untuk itu telah ditetapkan strategi dan prioritas APBD dalam 2 (Dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program telah didukung dana untuk periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp27.268.574.101,- dengan rincian:

- a. Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai Rp9.648.757.701,00
 - Belanja Barang dan Jasa..... Rp17.619.816.400,00
- b. Belanja Modal
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin..... Rp2.066.188.208,0
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya..... Rp 0,00

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Sedangkan indikator kinerja dapat meliputi input, output, outcomes, benefit dan impacts. Pencapaian kinerja APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 95,74% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 80,20 %;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan nilai capaian Kinerja sebesar 99,58%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 79,61% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan nilai capaian kinerja sebesar 77,90 %;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 95,69 %;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 73,26% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 100%;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 65,66%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 94,14% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 46,22%;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 99,05 %;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 100%;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 95,16%;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 80,15 %.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 95,90 dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 95,90%
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 85,53% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 99,67%;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 92,23%; dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 74,33%.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 94,67% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 99,99 %;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 89,88%;
- Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 96,41% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,42%; dan
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan nilai capaian kinerja sebesar 86,97%
 - Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 62,80%
- Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 88,11% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan nilai capaian kinerja sebesar 89,29%; dan
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dengan nilai capaian kinerja sebesar 87,68%.
- Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 25,19% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 12,71%;

- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 48,52%;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 32,61%;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 12,71%;dan
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 19,40%.
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 76,46% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - Orientasi DPRD dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 77,13%;
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 66,67%;
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 53,33%.
- Kegiatan Penyerapan dan Penghimpun Aspirasi Masyarakat dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 89,29% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - Kunjungan Kerja Dalam Daerah dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 29,78%; dan
 - Pelaksanaan Reses dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 99,29%.
- Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 59,66% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - Koodinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 59,66%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Target dan realisasi pencapaian kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Target dan Realisasi Keuangan

URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA KUANTITATIF	JUMLAH SESUAI DPA (Rp)	REALISASI			SISA DANA (Rp)
					KEUANGAN		FISIK	
					(Rp)	%	%	
1		2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dacarah		Sabu Raijua	1 Paket	30.020.000,00	28.740.110,00	95,74	95,74	1.279.890,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sabu Raijua	1 Paket	5.960.000,00	4.780.000,00	80,20	80,20	1.180.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sabu Raijua	1 Paket	24.060.000,00	23.960.110,00	99,58	99,58	99.890,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.324.454.427,00	1.850.444.005,00	79,61	79,61	474.010.422,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sabu Raijua	1 Paket	2.101.009.427,00	1.636.615.005,00	77,90	77,90	464.394.422,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sabu Raijua	1 Paket	223.451.000,00	213.829.000,00	95,69	95,69	9.622.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				218.874.000,00	160.355.785,00	73,26	73,26	58.518.215,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sabu Raijua	1 Paket	48.450.000,00	48.450.000,00	100	100,-	0,00
2	Pendidikan dan Pelatihan	Sabu Raijua	1 Paket	170.424.000,00	111.905.785,00,-	65,66	65,66	58.518.215,00

URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA KUANTITATIF	JUMLAH SESUAI DPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA (Rp)	
					KEUANGAN		FISIK	
					(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.094.411.208,00	1.090.240.278,00	94,14	94,14	4.170.930,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sabu Raijua	1 Paket	19.180.000,00	8.865.000,00	46,22	46,22	10.315.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sabu Raijua	1 Paket	765.327.408,00	758.062.660,00	99,05	99,05	7.264.748,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sabu Raijua	1 Paket	49.800.000,00	49.800.000,00	100	100	0,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sabu Raijua	1 Paket	33.549.800,00	31.925.000,00	95,16	95,16	1.624.800,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Wilayah Propinsi NTT		226.554.000,00	181.587.618,00	80,15	80,15	44.966.382,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.687.140.000,00	1.618.000.000	95,90	95,90	69.140.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sabu Raijua	1 Paket	1.687.140.000,00	1.618.000.000	95,90	95,90	69.140.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				420.587.300,00	359.733.906,00	85,53	85,53	60.853.394,00

URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA KUANTITATIF	JUMLAH SESUAI DPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA (Rp)	
					KEUANGAN		FISIK	
					(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sabu Raijua	1 Paket	7.500.000,00	7.475.000,00	99,67	99,67	25.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sabu Raijua	1 Paket	252.580.000,00	232.948.906,00	92,23	92,23	19.631.094,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sabu Raijua	1 Paket	160.507.300,00	119.310.000,00	74,33	74,33	41.197.300,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				522.740.000,00	494.774.103,00	99,99	94,67	27.965.897,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sabu Raijua	1 Paket	247.800.000,00	247.774.103,00	99,99	99,99	25.897,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sabu Raijua	1 Paket	274.940.000,00	247.119.883,00	89,88	89,88	27.820.117,00
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Sabu Raijua	1 Paket	8.333.815.274,00	8.034.775.000,00	96,41	96,41	299.040.274,00
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah			7.420.703.274,00	7.303.259.538,00	98,42	98,42	117.443.736,00
2	Pengadaan Pakaian Dinas			653.992.000,00	568.800.000,00	86,97	86,97	85.192.000,00

URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA KUANTITATIF	JUMLAH SESUAI DPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA (Rp)	
					KEUANGAN		FISIK	
					(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	dan Atribut DPRD							
3	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD		1 Paket	259.120.000,00	162.716.151,00	62,80	62,80	96.403.849,00
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD				1.888.181.000,00	1.663.698.023,00	88,11	88,11	224.482.977,00
1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			505.400.000,00	451.253.000,00	89,29	89,29	54.147.000,00
2	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			1.382.781.100,00	1.212.445.023,00	87,68	87,68	170.336.077,00
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Sabu Raijua	1 paket	150.650.000,00	37.950.000,00	25,19	25,19	112.700.000,00
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sabu Raijua	1 Paket	30.130.000,00	3.830.000,00	12,71	12,71	26.300.000,00
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sabu Raijua	1 Paket	30.130.000,00	14.620.000,00	48,52	48,52	15.510.000,00
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sabu Raijua	1 Paket	30.130.000,00	9.825.000,00	32,61	32,61	20.305.000,00
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Sabu Raijua	1 Paket	30.130.000,00	3.830.000,00	12,71	12,71	26.300.000,00

URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA KUANTITATIF	JUMLAH SESUAI DPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA (Rp)	
					KEUANGAN		FISIK	
					(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Bidang Perekonomian							
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sabu Raijua	1 Paket	30.130.000,00	5.845.000,00	19,40	19,40	24.285.000,00
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				10.094.175.000,00	7.718.213.905,00	76,46	76,46	2.375.961.095,00
1	Orientasi DPRD	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi		9.644.175.000,00	7.438.213.905,00	77,13	77,13	2.205.961.095,00
2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sabu Raijua	1 Paket	300.000.000,00	200.000.000,00	66,67	66,67	100.000.000,00
3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sabu Raijua	1 Paket	150.000.000,00	80.000.000,00	53,33	53,33	70.000.000,00
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpun Aspirasi Masyarakat				2.261.280.000,00	2.019.095.000,00	89,29	89,29	242.185.000,00
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Sabu Raijua		325.200.000,00	96.845.000,00	29,78	29,78	228.355.000,00
2	Pelaksanaan Reses	Sabu Raijua	3 kali	1.936.080.000,00	1.922.250.000,00	99,29	99,29	13.830.000,00
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD				308.434.000,00	184.001.717,00	59,66	59,66	21.410.707,00
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi		308.434.000,00	184.001.717,00	59,66	59,66	124.432.283,00
TOTAL				29.334.762.309,00	25.200.142.404,00	85,91	85,91	4.134.619.905,00

3.2. Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam pencapaian kinerja APBD Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi dibawah 85% adalah:

1. Program Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai capaian kinerja sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 80,20% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan lembur.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 77,90% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian kinerja sebesar 65,66% disebabkan karena undangan kegiatan Asdeski dan ketersediaan waktu untuk mengikuti kegiatan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian kinerja sebesar 46,22% disebabkan karena.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 80,15% disebabkan karena disesuaikan dengan kegiatan urusan Kesekretariatan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 74,33% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil operasional.
 - Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 62,90% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan yang disebabkan 2 Anggota DPRD tidak mengikuti kegiatan dimaksud.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan nilai capaian kinerja sebagai berikut :
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 12,71% disebabkan karena disesuaikan dengan dengan kebutuhan dan jumlah pengaduan Masyarakat
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 48,52% disebabkan dengan kebutuhan dan jumlah pengaduan Masyarakat
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 32,61% disebabkan karena disesuaikan dengan dengan kebutuhan dan jumlah pengaduan Masyarakat
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 12,71% disebabkan karena disesuaikan dengan dengan kebutuhan dan jumlah pengaduan Masyarakat
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 19,40% disebabkan karena disesuaikan dengan dengan kebutuhan dan jumlah pengaduan Masyarakat
 - Orientasi DPRD dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 77,33% disebabkan karena disesuaikan dengan jadwal dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD akibat

pelantikan Anggota DPRD Periode 2024-2029 dan Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sabu Raijua Periode 2024-2029

- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 66,67% disebabkan karena disesuaikan dengan jadwal dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD karena ada pergantian Pimpinan, Alat kelengkapan dan Fraksi periode 2024-2029
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 66,67% disebabkan karena disesuaikan dengan jadwal dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD karena ada pergantian Pimpinan, Alat kelengkapan dan Fraksi periode 2024-2029
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 29,78% disebabkan karena disesuaikan dengan dengan jadwal dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD serta pelantikan Anggota DPRD Periode 2024-2029 dan Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sabu Raijua Periode 2024-2029
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 59,66% disebabkan karena disesuaikan dengan jadwal dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD serta adanya pelantikan Anggota DPRD Periode 2024-2029 dan Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sabu Raijua Periode 2024-2029

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sebagai entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan entitas akuntansi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum/Daerah dengan terbitnya SP2D GU, SP2D LS, dan TU Nihil. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Kewajiban entitas akuntansi hanya bersifat jangka pendek.

Entitas akuntansi tidak menggunakan istilah laba, tetapi selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan sebagai surplus/defisit. Sedangkan penentuan SiLPA untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan belanja yang merupakan surplus/defisit.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik secara umum yang dipilih Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan menggunakan referensi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

- Akuntansi Pemerintah (SAP) , kecuali penyajian kembali atas beberapa Akun Laporan Keuangan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pos-pos laporan keuangan;
- b. Periode pembukuan atau periode akuntansi adalah satu tahun anggaran yang dimulai 01 Januari dan berakhir 31 Desember;
 - c. Mata uang yang digunakan adalah rupiah;
 - d. Pendapatan dan belanja diakui dengan basis Akrua, yang berarti dicatat sebagai pendapatan atau belanja tanpa memperhatikan saat sudah diterima/dikeluarkan ke/dari kas daerah.khusus untuk transaksi akhir tahun terdapat belanja yang telah dicatat pada saat SP2D diterbitkan,meskipun belum dicairkan (uang belum dikeluarkan dari kas daerah);
 - e. Pos-pos Neraca (Aset, Kewajiban dan Ekuitas) menggunakan basis Akrua yaitu transaksi diakui sebagai aset/kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat Kas atau setara kas diterima atau dibayar;
 - f. Pelaksanaan pembukuan menganut asas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran; dan
 - g. Realisasi belanja dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran) disusun berdasarkan realisasi angka laporan pertanggungjawaban yang telah diverifikasi dan disahkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 yang disajikan adalah (LRA) Laporan Realisasi Anggaran, (LO) Laporan Operasional, Perubahan Ekuitas dan Neraca, sebagai berikut:

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 menunjukkan realisasi sebagai berikut:

5.1.1 Belanja Daerah

Jumlah Belanja Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.200.142.404,00 atau 85,91% dari anggaran sebesar Rp29.334.762.309,00 dan jumlah realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.631.266.407,00.

Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.23.203.904.744,00 dan Belanja Modal sebesar Rp1.996.237.660,00.

5.1.1.1 Belanja Operasi

Jumlah realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.203.904.744,00 atau 85,09% dari anggaran sebesar Rp27.268.574.101,00 dan jumlah Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.629.806.407,00 realisasi Belanja Operasi terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

31-12-2024	31-12-2023
Rp9.057.803.543,00	Rp8.916.033.312,00

Jumlah sebesar Rp9.057.803.543,00 atau 93,88% dari rencana anggaran belanja pegawai yang ditetapkan pada perubahan APBD sebesar Rp.9.648.757.701,00 dan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp8.916.033.312,00 .

Realisasi belanja pegawai dirinci sebagai berikut:

Tabel. 5.1 Rincian Realisasi Belanja Pegawai

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			2024		2023
			(Rp)	%	(Rp)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	969.596.203,00	775.218.796,00	79,95	737.123.340,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	44.853.480,00	44.850.400,00	99,99	5.933.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	139.943.468,00	85.236.396,00	60,64	77.341.276,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.279.487,00	4.036.536,00	55,45	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	122.046.750,00	103.950.000,00	85,17	116.370.000,00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			2024		2023
			(Rp)	%	(Rp)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	50.053.472,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.812.000,00	19.910.000,00	91,28	17.945.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.590.000,00	2.590.000,00	100	370.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	70.667.436,00	46.056.120,00	65,18	46.638.480,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.055.520,00	3.186.480,00	78,57	144.840,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.175.000,00	12.119.659,00	60,07	5.563.158,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	256.528,00	169.065,00	65,91	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.000,00	10.573,00	10,57	10.457,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.800,00	1.065,00	38,04	12,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	77.807.537,00	50.445.888,00	64,83	49.568.272,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.240.919,00	2.724.200,00	84,06	336.120,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.056.312,00	1.605.905,00	78,10	1.509.910,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	92.270,00	92.268,00	100	14.240,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.168.937,00	4.817.774,00	78,10	4.529.737,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	276.810,00	276.792,00	99,99	42.718,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.997.981,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			2024		2023
			(Rp)	%	(Rp)
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	224.267,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	523.818.750,00	453.808.748,00	86,63	472.505.779,00
5.1.01.02.01.0002	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	28.887.500,00	25.505.340,00	88,29	2.100.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	106.347.000,00	106.347.000,00	100	105.924.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	10.900.000,00	3.950.000,00	36,24	3.400.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	9.804.000,00	7.632.000,00	77,85	7.632.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	644.700.000,00	639.240.000,00	99,15	451.290.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	30.139.200,00	28.669.200,00	95,12	30.147.600,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	41.616.200,00	38.672.280,00	92,93	40.193.100,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.293.500,00	99,00	38.682.00,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	648.737.25000	99,14	654.370.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.579.600,00	52.800300,00	83,05	63.396.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.606.300,00	9.500.400,00	75,36	11.510.100,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.499.400.000,00	99,17	1.512.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			2024		2023
			(Rp)	%	(Rp)
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100	378.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	12.313.450,00	5.874.706,00	47,71	725.309,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DRD	28.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi DPRD	40.074.552,00	38.505.726,00	96,09	38.939.292,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	928.368,00	919.044,00	99,00	928.368,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.785.104,00	2.757.132,00	99,00	2.785.104,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.508.000.000,00	1.486.250.000,00	98,56	1.479.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.496.000.000,00	2.460.000.000,00	98,56	2.448.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	101.640.000,00	91,67	110.880.000,00
	Jumlah	9.648.757.701,00	9.057.803.543,00	93,88	8.916.033.312,00

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 22 (Dua Puluh Dua) rekening belanja pegawai yang mencapai realisasi dibawah 85% yaitu:

1. Belanja Gaji Pokok PNS dengan nilai realisasi sebesar 79,96% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil
2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dengan nilai realisasi sebesar 60,91% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil
3. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK dengan nilai realisasi sebesar 55,45% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil
4. Belanja Tunjangan Fungsional PNS dengan nilai realisasi sebesar 0% disebabkan karena Tunjangan Fungsional PNS masih menggunakan rekening Belanja Tunjangan Jabatan PNS.
5. Belanja Tunjangan Beras PNS dengan nilai realisasi sebesar 65,18% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil
6. Belanja Tunjangan Beras PPPK dengan nilai realisasi sebesar 78,57% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil
7. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS dengan nilai realisasi sebesar 60,07% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil

8. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK dengan nilai realisasi sebesar 65,91% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil
9. Belanja Pembulatan Gaji PNS dengan nilai realisasi sebesar 10,57% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil
10. Belanja Pembulatan Gaji PPPK dengan nilai realisasi sebesar 38,04% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil
11. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dengan nilai realisasi sebesar 64,83% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil;
12. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dengan nilai realisasi sebesar 84,06% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil
13. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK dengan nilai realisasi sebesar 78,10% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil
14. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS dengan nilai realisasi sebesar 79,04% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil
15. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS dengan nilai realisasi sebesar 0% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil;
16. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK dengan nilai realisasi sebesar 0% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil;
17. Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai realisasi sebesar 36,24% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil;
18. Belanja Jasa Pengelolaann BMD dengan nilai realisasi sebesar 77,85% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil;
19. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dengan nilai realisasi sebesar 83,05% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil;
20. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD dengan nilai realisasi sebesar 75,36% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil;
21. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan anggota DPRD dengan nilai realisasi sebesar 47,71% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil;
22. Belanja Pembulatan Gaji DPRD dengan nilai realisasi sebesar 0% disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan riil;

b. Belanja Barang dan Jasa

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)
Rp14.146.101.201,00	Rp12.713.773.095,00

Jumlah sebesar Rp14.146.101.201,00 atau 80,29% dari rencana anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan pada perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp17.619.816.400,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.713.773.095,00.

Realisasi belanja barang dan Jasa dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.2 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			2024		2023
			(Rp)	%	(Rp)
5.1.02.01.01.00 01	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	146.758.100,00	142.313.000.000,00	96,97	15.250.000,00
5.1.02.01.01.00 12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.800.000,00	16.800.000,00	100	
5.1.02.01.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	13.330.200,00	13.315.000,00	99,89	49.468.000,00
5.1.02.01.01.00 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas	29.087.200,00	29.005.000,00	99,72	
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	35.249.800,00	33.600.000,00	95,32	8.486.400,00
5.1.02.01.01.00 27	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	7.500.000,00	7.475.000,00	99,67	4.992.000,00
5.1.02.01.01.00 29	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	12.061.800,00	12.030.000,00	99,74	
5.1.02.01.01.00 31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat listrik	79.162.000,00	66.595.023,00	84,12	11.507.000,00
5.1.02.01.01.00 35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir Cendera Mata	300.330.000,00	257.400.000,00	85,71	
5.1.02.01.01.00 36	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya	44.991.000,00	23.167.000,00	51,49	10.364.000,00
5.1.02.01.01.00 40	Belanja Persediaan untuk dijual/Diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan	15.000.000,00	15.000.000,00	100	
5.1.02.01.01.00 52	Belanja makan dan minum rapat	1.630.400.000,00	1.555.253.000,00	95,39	2.088.030.000,00
5.1.02.01.01.00 53	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	1.134.000.000,00	1.007.000.000,00	88,80	1.134.000.000,00
5.1.02.01.01.00 60	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	362.662.000,00	320.400.000,00	88,35	27.150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			2024		2023
			(Rp)	%	(Rp)
	Pimpinan dan Anggota DPRD				
5.1.02.01.01.00 63	Belanja Pakaian Dinas Harian PDH				119.528.000,00
5.1.02.01.01.00 65	Belanja Pakaian Sipil Resmi PSR	11.800.000,00	11.800.000,00	100	11.800.000,00
5.1.02.01.01.00 74	Belanja Pakaian Adat Daerah	36.650.000,00	36.650.000,00	100	
5.1.02.01.02.00 12	Belanja Pipa-Pipa Plastik (UPVC)	13.080.000,00	13.080.000,00	100	
5.1.02.01.02.00 13	Belanja Pipa-pipa Lainnya	948.900,00	948.000,00	99,91	
5.1.02.01.04.00 62	Belanja Peralatan dan Mesin—Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.300.000,00		0,00	
5.1.02.02.01.00 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	100	76.600.000,00
5.1.02.02.01.00 08	Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal,Buletin,Majalah Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	22.800.000,00	22.300.000,00	97,81	20.400.000,00
5.1.02.02.01.00 29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	450.000.000,00	280.000.000,00	62,22	435.000.000,00
5.1.02.02.01.00 31	Belanja Jasa Keamanan	72.000.000,00	72.000.000,00	100	0,00
5.1.02.02.01.00 33	Belanja Jasa Tenaga Sopir				72.000.000,00
5.1.02.02.01.00 39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				4.500.000,00
5.1.02.02.01.00 46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	22.000.000,00	12.500.000,00	56,82	
5.1.02.02.01.00 47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	60.000.000,00	60.000.000,00	100	
5.1.02.02.01.00 48	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	201.760.000,00	184.040.000,00	91,22	
5.1.02.02.01.00 59	Belanja Tagihan Telepon	18.900.000,00	8.876.300,00	46,96	5.025.000,00
5.1.02.02.01.00 60	Belanja Tagihan Air	97.200.000,00	76.092.606,00	78,28	28.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			2024		2023
			(Rp)	%	(Rp)
5.1.02.02.01.00 61	Belanja Tagihan Listrik	206.258.400,00	187.697.000,00	91,00	147.919.335,00
5.1.02.02.01.00 63	Belanja Kawat/ Faximili/Internet /TV berlangganan				7.321.600,00
5.1.02.02.01.00 71	Belanja Lembur	30.020.000,00	28.740.110,00	95,74	1.450.000,00
5.1.02.02.01.00 73	Belanja Medical Chek Up	80.000.000,00	63.000.000,00	78,75	52.688.000,00
5.1.02.02.04.00 37	Belanja Sewa Kendaraan Angkutan Barang				15.000.000,00
5.1.02.02.04.00 43	Belanja Sewa Angkutan Darat Bermotor Lainnya				540.000.000,00
5.1.02.02.02.00 09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				360.000.000,00
5.1.02.02.02.00 50	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	240.000.000,00	240.000.000,00	100	0,00
5.1.02.02.08.00 04	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Design Interior	300.000.000,00	296.000.000,00	98,67	
5.1.02.02.12.00 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	0,00	0	25.000.000,00
5.1.02.03.02.00 35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkutan Darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan	247.800.000,00	247.774.103,00	99,99	487.744.572,00
5.1.02.03.02.00 36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkutan Darat bermotor-kendaraan dinas bermotor penumpang	274.940.000	247.119.883	89,88	
5.1.02.03.02.00 38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor- kendaraan bermotor beroda dua			0,00	30.028.200,00
5.1.02.03.02.01 17	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan rumah tangga- alat kantor-alat kantor	16.350.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			2024		2023
			(Rp)	%	(Rp)
5.1.02.03.02.01 21	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin	12.200.000,00	12.100.000,00	99,18	0,00
5.1.02.04.01.00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.240.557.000,00	7.791.155.176,00	76,08	6.500.650.988,00
5.1.02.04.01.00 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	635.320.000,00	273.275.000,00	43,01	413.070.000,00
Jumlah		17.619.816.400,00	14.146.101.201,00	91,56	12.713.773.095,00

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 11 (Sebelas) rekening belanja barang yang mencapai realisasi dibawah 85% yaitu:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dengan realisasi 84,12% karena disesuaikan dengan kebutuhan riil
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan realisasi 51,49% karena disesuaikan dengan kebutuhan riil.
3. Belanja Peralatan dan Mesin—Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan realisasi 0 % karena tidak dapat dibelanjakan
4. Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan realisasi 62,22% karena disesuaikan dengan kebutuhan riil.
5. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi dengan realisasi 56,82 karena disesuaikan dengan kebutuhan riil.
6. Belanja Tagihan Telepon dengan realisasi 46,96 karena disesuaikan dengan kebutuhan riil.
7. Belanja Tagihan Air dengan realisasi 78,28% karena disesuaikan dengan kebutuhan riil.
8. Belanja Medical Check Up dengan realisasi 78,75% karena disesuaikan dengan kebutuhan riil.
9. Belanja Bimbingan Teknis dengan realisasi 0% karena tidak mengikuti kegiatan Adkasi bagi Pimpinan DPRD
10. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan realisasi 76,08 karena disesuaikan dengan kebutuhan riil.
11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan realisasi 43,01 karena disesuaikan dengan kebutuhan riil.

5.1.1.2 Belanja Modal

Jumlah Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.996.237.660,00 atau 96,61% dari anggaran sebesar Rp2.066.188.208,00 dan jumlah Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.460.000,00 realisasi Belanja Modal terdiri dari:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023(Rp)
Rp1.996.237.660,00	Rp1.460.000,00

Jumlah sebesar Rp 1.996.237,00 merupakan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dengan rencana anggaran sebesar Rp2.066.188.208 atau 96,61% dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.460.000,00.

Jumlah realisasi belanja modal terdiri dari:

Tabel.5.3. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			2023		2022
			(Rp)	%	(Rp)
5.2.02.05.02.006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	61.734.208,00	61.600.000,00	99,78	1.460.000,00
5.2.02.10.01.002	Belanja Modal Personal Komputer			0	0,00
Jumlah		61.734.208,00	61.600.000,00	99,78	1.460.000,00

b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023(Rp)
Rp0,00	Rp0,00

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dengan rencana anggaran sebesar Rp0,00 atau 0% dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

Jumlah realisasi belanja Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			2024		2023
			(Rp)	%	(Rp)
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0	0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Sekretariat DPRD tidak mengelola penerimaan sehingga terjadi Desifit anggaran sebesar (Rp29.334.762.309,00) dengan realisasi sebesar (Rp25.200.142.404,00).

5.2 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang pelaporan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode

Laporan Operasional terdiri dari :

5.2.1 Beban

Beban adalah kewajiban Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban Rp.23.549.088.086,00 pada tahun 2024 jumlah tersebut terdiri dari Beban Pegawai-LO sebesar Rp9.057.803.543,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp14.176.501.201,00 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp313.567.492,00 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.200.000,00 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp15.850,00 dan tahun 2022 sebesar Rp22.047.253.752,00.

- a. Beban Pegawai Tahun 2024 Sebesar Rp9.057.803.543,00 dan Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp8.916.033.312,00.

Beban pegawai dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.5 Beban Pegawai

No	Beban Pegawai	31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	820.069.196,00	743.056.340,00	77.012.856,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	89.272.932,00	77.341.276,00	11.931.656,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	103.950.000,00	116.370.000,00	(12.420.000,00)
4	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.500.000,00	18.315.000,00	4.185.000,00
5	Beban Tunjangan Beras ASN	49.245.600,00	46.783.320,00	2.462.280,00
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.288.724,00	5.563.158,00	6.725.566,00
7	Beban Pembulatan Gaji ASN	11.638,00	10.469,00	1.169,00
8	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	53.170.088,00	49.904.392,00	3.265.696,00
9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.698.173,00	1.524.150,00	174.023,00
10	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	5.094.566,00	4.572.455,00	522.111,00
11	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	479.314.088,00	474.605.779,00	4.708.309,00
12	Beban Honorarium	110.297.000,00	109.324.000,00	973.000,00
13	Beban Jasa Pengelolaan BMD	7.632.00,00	7.632.00,00	0,00
14	Beban Uang Representasi DPRD	639.240.000,00	451.290.000,00	187.950.000,00
15	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	28.669.200,00	30.147.600,00	(1.478.400,00)
16	Beban Tunjangan Beras DPRD	38.672.280,00	40.193.100,00	(1.520.820,00)
17	Beban Uang Paket DPRD	38.293.000,00	38.682.000,00	(388.5000,00)
18	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	(5.633.250,00)

No	Beban Pegawai	31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
19	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	52.800.300,-	63.579.600,-	(10.779.300,00)
20	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	9.500.000,00	11.510.100,00	(2.09.700,00)
21	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.499.400.000,00	1.512.000.000,00	(12.600.000,00)
22	Beban Tunjangan Reses DPRD	252.000.000,00	378.000.000,00	(126.000.000,00)
23	Beban Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan	5.874.706,00	725.309,00	5.149.397,00
24	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.528.431.902,00	1.521.652.764,00	6.779.138,00
25	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.460.000.000,00	2.448.000.000,00	12.000.000,00
26	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	101.640.000,00	110.880.000,00	(9.240.000,00)
	Total	9.057.803.543,00	8.916.033.312,00	141.770.231,00

- b. Beban Barang Pakai Habis Tahun 2024 sebesar Rp3.578.203.023,00 dan Beban Barang Pakai Habis Tahun 2023 sebesar Rp3.481.535.400,00.

Tabel 5.6 Beban Barang Pakai Habis

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024 (Rp)	2023 (Rp)	
1	Beban Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	142.313.000,00	15.250.000,00	127.063.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Lainnya	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
3	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	13.315.000,00	49.468.000,00	(36.153.000,00)
4	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertasb dan Cover	29.005.000,00	0,00	29.005.000,00
5	Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor_Bahan Cetak	33.600.000,00	8.486.400,00	25.113.600,00
6	Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor_Benda Pos	7.475.000,00	4.992.000,00	2.483.000,00
7	Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor_Bahan Komouter	12.030.000,00	0,00	12.030.000,00
8	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan - Perabaot Kantor	0,00	960.000,00	(960.000,00)
9	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor -Alat listrik	66.595.023,00	11.507.000,00	55.088.023,00
10	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor -Souvenir/Cendera Mata	257.400.000,00	0,00	257.400.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	53.567.000,00	10.364.000,00	43.203.000,00

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024 (Rp)	2023 (Rp)	
12	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
13	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.555.253.000,00	2.088.030.000,00	(532.777.000,00)
14	Beban Makanan dan Minuman Tamu	1.007.000.000,00	1.134.000.000,00	(127.000.000,00)
15	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	320.400.000,00	27.150.000,00	293.250.000,00
16	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			
17	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	119.528.000,00	(119.528.000,00)
18	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
19	Beban Pakaian Adat	36.650.000,00	0,00	36.650.000,00
	JUMLAH	3.578.203.023,00	3.481.535.400,00	96.667.623,00

- c. Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp14.028.000,00 dan Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2023 sebesar Rp0,00

Tabel 5.7 Beban Barang Tak Habis Pakai

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024 (Rp)	2023 (Rp)	
1	Beban Pipa Pipa Plastik PVC (UPVC)	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
2	Beban Pipa-Pipa Lainnya	948.000,00	0,00	948.000,00
	JUMLAH	14.028.000,00	0,00	14.028,00

- d. Beban Jasa Kantor tahun 2024 sebesar Rp996.846.016,00 Dan Beban Jasa Kantor Tahun 2023 sebesar Rp851.103.935,00.

Beban Barang dan Jasa dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.8 Beban Jasa Kantor

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024 (Rp)	2023 (Rp)	
1	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	1.600.000,00	76.600.000,00	(75.000.000,00)
2	Beban Hoorarium Tim Penyusunan Jurnal,Buletin, Majalah,Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	22.300.000,00	20.400.000,00	1.900.000,00
3	Beban Jasa Tenaga Ahli	280.000.000,00	435.000.000,00	(155.000.000)
4	Beban Jasa Tenaga Keamanan	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
5	Beban Tenaga Sopir	0,00	72.000.000	(72.000.000,00)
6	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024 (Rp)	2023 (Rp)	
7	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
8	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
9	Beban Tagihan Telepon	8.876.300,00	5.025.000,00	3.851.300,00
10	Beban Tagihan Air	76.092.606,00	28.200.000,00	47.892.606,00
11	Beban Tagihan Listrik	187.697.000,00	147.919.335,00	39.777.665,00
12	Beban Kawat/Faximili/Internet/TV berlangganan	0,00	7.321.600,00	(7.321.600,00)
13	Beban Lembur	28.740.110,00	1.450.000,00	27.290.110,00
14	Beban Medical Chek Up	63.000.000,00	52.688.000,00	10.312.000,00
	JUMLAH	996.846.016,00	851.103.935,00	145.742.081,00

- e. Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp480.000.000,00 dan Beban Sewa Peralatan dan Mesin 2023 sebesar Rp555.000.000,00.

Tabel 5.9 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024(Rp)	2023 (Rp)	
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	480.000.000,00	0,00	480.000.000,00
1	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
2	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	540.000.000,00	(540.000.000,00)
	JUMLAH	480.000.000,00	555.000.000,00	15.000.00,00

- f. Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp240.000.000,00 dan Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp360.000.000,00.

Tabel 5.9 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024 (Rp)	2023 (Rp)	
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	360.000.000,00	(360.000.000,00)
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
	JUMLAH	240.000.000,00	360.000.000,00	(120.000.000,00)

- g. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2024 sebesar Rp296.000.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00

Tabel 5.10 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024 (Rp)	2023 (Rp)	
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	296.000.000,00	0,00	296.000.000,00

	JUMLAH	296.000.000,00	0,00	296.000.000,00
--	---------------	-----------------------	-------------	-----------------------

- h. Beban Kursus/Pelatihan, sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp25.000.000,00.

Tabel 5.10 Beban Bimbingan Teknis

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024 (Rp)	2023 (Rp)	
1	Beban Bimbingan Teknis	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)
	JUMLAH	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)

- i. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp506.993.986,00 dan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp528.372.772,00.

Tabel 5.11 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024 (Rp)	2022 (Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor perorangan	247.774.103,00	487.744.572,00	(239.970.469,00)
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	247.119.883,00	0,00	247.119.883,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor beroda dua	0,00	30.028.200,00	(30.028.200,00)
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	0,00	10.600.000,00	(10.600.000,00)
5	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00
	JUMLAH	506.993.986,00	528.372.772,00	(21.378.786,00)

- j. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp8.064.430.176,00 dan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp6.913.720.988,00.

Tabel 5.12 Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024 (Rp)	2023 (Rp)	
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.791.155.176,00	6.500.650.988	1.290.504.188,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	273.275.000,00	413.070.000,00	(139.795.000,00)
	JUMLAH	8.064.430.176,00	6.913.720.988,00	1.150.709.188,00

- k. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp313.567.492,00 dan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp 415.287.345,00.

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.13 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024Rp)	2023(Rp)	
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.261.905,00	11.637.798,00	7.624.107,00
3	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	247.256,00	0,00	247.256,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.796.534,00	8.722.120,00	(3.925.58600)
6	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.694.970,00	4.244.399,00	(1.549.429,00)
7	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	36.415.229,00	55.481.143,00	(19.065.914,00)
8	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	933.334,00	3.499.999,00	(2.566.665,00)
9	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	833.065,00	16.345.552,00	(15.512.487,00)
10	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	7.574.998,00	(7.574.998,00)
11	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.075.794,00	30.788.340,00	(5.021.660,00)
12	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	5.106.360,00	5.106.360,00	0,00
13	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	2.095.683,00	2.095.684,00	(1,00)
14	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	1.066.666,00	(1.066.666,00)
15	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.066.666,00	1.600.000,00	(533.334,00)
16	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	8.698.420,00	8.698.420,00	0,00
17	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00
18	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	120.000.000,00	160.000.000,00	(40.000.000,00)
19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	900.000,00	900.000,00	0,00
20	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	15.944.600,00	15.944.600,00	0,00
21	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024Rp)	2023(Rp)	
22	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	4.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)
23	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	606.876,00	4.632.500,00	(4.025.624,00)
24	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	0,00	661.490,00	(661.490,00)
25	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	320.833,00	343.750,00	(22.917,00)
26	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	57.209.272,00	56.327.666,00	881.606,00
27	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	390.000,00	390.000,00	0,00
28	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.074.029,00	10.655.860,00	(2.51.831,00)
29	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Computer Lainnya	326.666,00	0,00	326.666,00
	JUMLAH	313.567.492,00	415.287.345,00	(101.704.003,00)

1. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp1.200.000,00 dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 Sebesar Rp1.200.000,00.

Tabel 5.14 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2024 (Rp)	2022 (Rp)	
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.200.000	1.200.000,00	0,00
	JUMLAH	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

5.2.2 Surplus/Defisit Operasi

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode laporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan operasional.

Surplus/defisit Laporan Operasional adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Defisit LO sebesar (Rp23.549.088.086,00) merupakan perbandingan dari pendapatan – LO sebesar Rp0,00 dikurangi beban sebesar (Rp23.549.088.086,00).

5.3 . Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasi tahun 2023.

Dari Laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.16 Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	EKUITAS AWAL	725.024.597,00	1.041.171.105,00
2.	SURPLUS /DEFISIT-LO	(23.549.088.086,00)	(22.047.253.752,00)
3.	RK PPKD	25.200.142.404,00	21.631.266.407,00
4.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Koreksi selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Lain-Lain	(8.978.385,00)	99.840.837,00
3.	EKUITAS AKHIR	2.367.100.530,00	725.024.597,00

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas Awal 2024 sebesar Rp725.024.597,00 merupakan relaksifikasi dana tahun 2024 sebesar sebagai berikut:

Tabel 5.17 Ekuitas Awal

No.	Uraian	2023 Rp)	2022 (Rp)
1	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Persediaan	0,00	0,00
3	Peralatan dan Mesin	7.987.849.704,00	6.112.436.794,00
4	Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	317.000,00	0,00
6	Aset Tetap Lainnya	14.711.300,00	14.711.300,00
7	Akumulasi Penyusutan	(5.870.120.383,00)	(5.630.863.489,00)
8	Aset Lainnya	174.342.909,00	168.739.992,00
	Jumlah	2.367.100.530,00	725.024.597,00

2. Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)

Pengurangan Ekuitas bersumber dari Defisit-LO pada akhir tahun 2024 senilai (Rp23.549.088.086,00) yang merupakan perbandingan dari pendapatan-LO sebesar Rp0.00

dikurangi beban sebesar Rp23.549.088.086,00 dan di tahun 2023 sebesar Rp22.047.253.752,00.

3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas bersumber dari dampak komulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar pada akhir tahun 2024 senilai (Rp8.978.385,00) dan tahun 2023 senilai Rp99.840.837,00

4. Kewajiban untuk dikonsolidasikan Tahun 2024 sebesar Rp25.200.142.404,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp21.631.266.407,00 yang merupakan realisasi belanja operasional Tahun 2024 sebesar Rp21.631.266.407,00.

5. Ekuitas Akhir

Dampak kumulatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.18 Ekuitas Akhir

No	Uraian	2024(Rp)	2023(Rp)
1.	Saldo Awal	725.024.597,00	1.041.171.105,00
2.	DEFISIT-LO	(23.549.088.086,00)	(22.047.253.752,00)
3	Lain-Lain	(8.978.385,00)	99.840.837,00
4	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	25.200.142.404,00	21.631.266.407,00
	EKUITAS AKHIR	2.367.100.530,00	725.024.597,00

5.4 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

5.4.1 Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset meliputi:

5.4.1.1

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023(Rp)
Rp0,-	Rp0,-

Aset Lancar

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang bersifat lancar dengan uraian sebagai berikut:

5.4.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31-12-2024(Rp)	31-12-2023 (Rp)
Rp0,00	Rp0,00

Saldo Kas dibendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

5.4.1.3 Persediaan

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023(Rp)
Rp0,00	Rp0,00

Jumlah Persediaan TA 2024 sebesar Rp0,00 (nihil) dan Persediaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 adalah merupakan barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan pada tahun 2023 dan sampai akhir 31 Desember 2024 barang tersebut tidak tersisa.

5.4.2.1 Aset Tetap

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)
Rp2.192.757.621,00	Rp556.284.605,00

Jumlah tersebut merupakan aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.192.757.621,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp556.284.605,00 berupa:

Tabel 5.19 Aset Tetap

No.	Uraian	31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)	Tambah/ (Kurang) (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	7.987.849.704,00	6.112.436.794,00	1.875.412.910,00
2.	Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
3.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	317.000,00	00,00	317.000,00
4.	Aset Tetap Lainnya	14.711.300,00	14.711.300,00	0,00
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(5.870.120.383,00)	(5.630.863.489,00)	(239.256.894,00)
Jumlah		2.192.757.621,00	556.284.605,00	1.636.473.016,00

5.4.1.2.1 Peralatan dan Mesin

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)
7.987.849.704,00	6.112.436.794,00

Jumlah sebesar Rp7.987.849.704,00 merupakan akumulasi nilai peralatan dan mesin yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua dan memenuhi klasifikasi aset tetap yaitu nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai per 31 Desember 2024 dan perolehan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp6.112.436.794,00

Berikut adalah rincian peralatan dan mesin:

Tabel 5.20 Peralatan dan Mesin

No	Peralatan dan Mesin	Saldo	Saldo	Tambah/ (Kurang)
		31/12/2024	31/12/2023	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	
1	Alat Bantu	60.250.000,00	5.250.000,00	0
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.081.046.750,00	3.463.046.750,00	1.618.000.000,00
3	Alat Pengolahan	41.060.000,00	41.060.000,00	0

No	Peralatan dan Mesin	Saldo	Saldo	Tambah/ (Kurang)
		31/12/2024	31/12/2023	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	
4	Alat Kantor	172.648.060,00	111.415.900,00	61.232.160,00
5	Alat Rumah Tangga	1.061.919.920,00	992.549.670,00	69.370.250,00
6	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	59.089.157,00	59.089.157,00	,00
7	Alat Studio	77.965.100,00	77.965.100,00	0
8	Alat Komunikasi	890.398.000,00	890.398.000,00	0
9	Peralatan Pemancar	13.350.000,00	13.350.000,00	0
10	Alat Kedokteran	30.000.000,00	30.000.000,00	0
11	Unit Alat Laboratorium	6.500.000,00	6.500.000,00	0
12	Alat Peraga Praktik Sekolah	32.341.917,00	32.341.917,00	0
13	Komputer Unit	318.701.000,00	318.701.000,00	0
14	Peralatan Komputer	70.769.300,00	70.769.300,00	0
	JUMLAH	7.987.849.704,00	6.112.436.794,00	1.875.412.910,00

5.4.1.2.2 Gedung dan Bangunan

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)
Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00

Jumlah sebesar Rp60.000.000,00 merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua dan memenuhi klasifikasi aset tetap yaitu nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai per 31 Desember 2024 dan perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp60.000.000,00.

5.4.1.2.3 Jalan, Jaringan dan Irigasi

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)
317.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan harga perolehan Jalan, Jaringan dan Instalasi, yang dimiliki dan/atau dikuasai Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2024 sebesar Rp317.000,00

5.4.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)
14.711.300,00	14.711.300,00

Jumlah tersebut merupakan harga perolehan Aset Tetap lainnya berupa buku-buku perpustakaan, yang dimiliki dan/atau dikuasai Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu

Raijua per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp14.711.300,00 Dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.711.300,00.

Tabel 5.21 Aset Tetap Lainnya

NO	JUDUL BUKU	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)
1	Kepemimpnan transformasional dlm birokrasi	2013	108.000,00
2	Pokok2 Kepegawaian PNS	2013	78.000,00
3	Seri backpacking & traveling : Exotic NTT	2013	122.500,00
4	Membangun diatas puing Integritas	2013	156.000,00
5	Negeri tanda tanya	2013	66.000,00
6	Korupsi : Penyakit sosial yg mematikan	2013	78.000,00
7	Ilmu olitik dlm paradigma abad 21 jilid 2	2013	267.500,00
8	Dasar2 Hukum pidana indo dlm perspektif.....	2013	79.600,00
9	Himp. peraturan pemberantasan tindak pidana	2013	150.000,00
10	Himp.Perpu RI pemilu DPR,DPD dan DPRD	2013	26.500,00
11	Permendagri no.17 th 2007 ttg pedoman teknis	2013	56.300,00
13	Perpres no.70 perubahan ke-2 atas perpres no.54	2013	54.000,00
14	Perpu ttg PNS super lengkap	2013	46.500,00
15	Politik hukum pembentukan UU pasca Amandemen	2013	87.000,00
16	UU RI no.8 ttg pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD	2013	96.000,00
17	UU no.32 th 2004 ttg Pemerintah Daerah	2013	42.000,00
18	UU perpajakan SC: dilengkapi tatacara perpajakan	2013	57.000,00
19	UU RI no.28 th 2009 ttg Pajak daerah dan Retribusi	2013	34.500,00
20	UU RI no.8 th 2012 ttg Pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD	2013	36.000,00
21	UU RI no.15 th 2011 dan Peraturan KPU ttg Penyelenggara	2013	27.000,00
22	UU dan Permendagri no.4 dan no37 ttg APBN & APBD	2013	72.000,00
24	UU RI no.2 th 2008 ttg Partai politik	2013	78.000,00
25	Mempertimbangkan mahkama konstitusi	2013	102.000,00
26	kanker lenyap berkat sirsak	2013	55.500,00

NO	JUDUL BUKU	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)
27	tips efektif agar cepat hamil	2013	32.500,00
28	101 tips kilat publik speaking yg memukau	2013	30.600,00
29	300 cth surat perjanjian (Kontrak atau srt resmi	2013	72.500,00
30	Aman dr resiko dlm pengadaan brg jasa pemerintah	2013	35.000,00
31	Buku pintar pengadaan brg & jasa Pemerintah	2013	94.500,00
32	Panduan lgkp pidato & MC utk pemula	2013	69.500,00
33	Personality plus at work: menjadi pribadi yg unggul	2013	83.000,00
34	succes through your leaders	2013	66.000,00
35	Tanya jawab seputar pengadaan brg dan jasa	2013	34.300,00
36	Wakil rakyat tdk merakyat Evaluasi Kinerja	2013	71.000,00
37	Way good things happen to good people	2013	100.500,00
38	Beatifull heart	2013	78.000,00
39	Buku pintar Kompas 2012	2013	174.000,00
40	Cara kreatif mengatasi kejenuhan bekerja	2013	54.000,00
41	Chicken soup for the soul : Doa yg terkabul	2013	93.500,00
42	Frans seda: Merawat Indo. disaat kritis	2013	42.500,00
43	Good Ethos : 7 etos kerja terbaik dan mulia	2013	66.000,00
44	Pedoman pengurusan prtanggungjawaban keuangan	2013	54.000,00
45	Petunjuk teknis peraturan presiden no.70 th 2012	2013	342.000,00
46	The maxwell daily reader SC : Pelajari.....	2013	81.500,00
47	Willpower instinct; the : Pengendalian diri	2013	78.000,00
48	Jokowi Spirit bantaran kali anyar	2013	60.000,00
49	sepatu Dahlan	2013	75.000,00
50	Total Habibie HC: Kecil tapi otak semua	2013	115.000,00
51	Ben Mboi : Memoar seorang dokter Prajurit	2013	144.000,00
52	Life without limits :Tanpa lengan & tungkai aku	2013	67.500,00
53	Buku pintar sejarah & Pengetahuan dunia abad 20	2013	192.000,00
54	G 30 S fakta atau Rekayasa	2013	162.000,00
55	Expedisi jejak peradaban NTT: Laporan Jurnalistik	2013	83.500,00
56	Serpihan budaya NTT	2013	150.000,00

NO	JUDUL BUKU	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)
57	Panduan lengkap pajak +CD / Yustinus Prastowo	2014	52.650,00
58	Bacaan wajib mengatasi aneka masalah teknis Pengadaan abarang dan jasa / Samsul Ramli	2014	74.700,00
60	Buku Pintar membuat SOP / Indah Puji Hartatik	2014	37.800,00
61	Cara Praktis Belajar pidato,MC dan Penyiar Radio / Ristina Yani Puspita	2014	34.200,00
62	Kamus Besar Bahasa Indonesia / Drs. Suharso dan Dra.Ana Retnoningsih	2014	92.500,00
63	Indonesia Gawat Darurat / Bambang Soesatio	2014	168.000,00
64	Belajar Dari Hati :pelajaran tentang mencintai mendengarkan	2014	57.050,00
65	Manajemen Aset	2014	45.450,00
66	Himpunan Peraturan tentang Perjalanan Dinas Baru th 2013/2014 / PT.Tamita Utama.CV	2014	91.800,00
68	Pembentukan Peraturan perundang-undangan / Indonesia Legal Center Publishing	2014	38.250,00
69	peraturan perundangan tentang partai politik / Pustaka Yustisia	2014	33.300,00
70	Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 / Visi Media	2014	27.900,00
71	Undan - Undang ASN / Pustaka Mahardika	2014	29.250,00
72	Undang Undang politik edisi Lengkap / fokus Media	2014	70.200,00
73	Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa / Rona Publishing	2014	29.700,00
74	Undang Undang RI no 8 Tahun 2012 ttg Pemilu DPR,DPD dan DPRD / Gradien Meditama	2014	43.200,00
75	Perundang undangan Keuangan Negara terbaru / Hadi Setia Tunggal SH	2014	161.550,00
76	Perpres RI No 70 Thn 2012 ttg perbahan Kedua Perpres RI No 54 Thn 2010 / Tim Permata Fres	2014	129.600,00
77	Catatan hati seorang Istri	2014	59.400,00
78	Memorising Like and Elephant / Yudi Lesmana	2014	59.400,00
79	Light up Your Leader ship / Cesar Antonio Munthe	2014	64.350,00
80	15 Menit sukses presentasi / Been Rafanani	2014	34.200,00

NO	JUDUL BUKU	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)
81	Mengembangkan emosi positif / J.Maurus	2014	42.300,00
82	Why Christian kids leave the faith	2014	64.800,00
83	Monolog politik / Putu fajar Arcana	2014	53.100,00
84	Sisi Lain Ahok Perjalanan Hidup Karir dan Keluarganya	2014	27.900,00
85	Buku Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS	2015	65.000,00
86	Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa	2015	360.000,00
87	Panduan Sertifikasi Guru berdasarkan UU Guru dan Dosen	2015	50.500,00
88	Buku Ilmu Pengetahuan	2015	158.850,00
89	Buku Para Penjaga Terakhir Bung Karno	2015	96.000,00
90	Buku Bung Hatta di matatiga putrinya	2015	74.700,00
91	Buku Para Penjaga terakhir Bung Karno	2015	48.000,00
92	Buku Susi Pudjiastuti Untold Story	2015	92.700,00
93	Buku Presiden Jokowi (Harapan Baru Indonesia)	2015	59.400,00
94	Buku Seknas Jokowi : Jalan Kemandirian Bangsa	2015	243.000,00
96	Buku : Jokowi Memimpin Kota menyentuh Jakarta	2015	92.500,00
97	Buku Jalan Harus Terang ,sisi Religius SBY dalam gaduhnya politik	2015	107.100,00
98	Buku Karni Ilyass -Lahir untuk berita	2015	92.700,00
99	Buku Living Sacrifice	2015	192.150,00
100	Buku Steve Job's Life Design	2015	77.850,00
101	Buku Teladan & Inspirasi 8 Seikandi Jokowi	2015	46.000,00
102	Happy Work Happy Life	2015	120.000,00
103	Buku Biasa Jadi Luar Biasa	2015	90.000,00
105	Buku 365 pesan kebangsaan JK	2015	73.350,00
106	Buku KUHAP & Penjelasannya ED Lengkap KLP	2015	46.080,00
107	Buku Ada waktu mengelus menggampar+CD	2015	43.770,00
108	Buku Pintar mengintip Kepribadian orang lain	2015	51.000,00
109	Buku Social Intelligence (Cetak Ulang)	2015	124.200,00

NO	JUDUL BUKU	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)
110	Focus (Cetak Ulang)	2015	91.800,00
111	Buku Kecerdasan emosional	2015	102.600,00
112	Buku Desentralisasi Asimetris DLM NKRI Kajian terhadap Daerah istimewa	2015	102.000,00
113	Buku Komunikasi Politik Soekarno	2015	79.000,00
114	Pembelian Undang-Undang RI No,23 Tahun 2014 : tentang Pemerintah Daerah Dan Perubahannya	2015	107.000,00
115	Pembelian 1 buah buku undang-undang no.23 tahun 2014 : tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya	2015	107.000,00
116	Pengadaan 1 buah buku Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya	2015	107.000,00
117	Pengadaan 1 buah Buku Himpunan Perundang-undangan RI UU MD3 (MPR,DPR & DPRD) UURI no.17 2014	2015	125.000,00
118	Buku Himpunan Perundang-undangan RI UU MD3 (MPR,DPR & DPRD) UURI no.17 2014	2015	187.500,00
119	Undang-undang Badan Pertanahan Nasional (BPN)	2015	100.500,00
120	Himpunan Peraturan PERUU RI UU Perlindungan AnakNo.35 Tahun 2014	2015	31.000,00
121	Buku Himpunan Peraturan PERUU RI UU Perlindungan AnakNo.35 Tahun 2014	2015	31.000,00
122	Undang-undang Pemeliharaan Gubernur,Bupati dan Walikota	2015	62.500,00
123	Buku Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah PP RI No.27 Tahun 2014	2015	65.000,00
124	Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah No.1 Tahun 2014	2015	89.000,00
125	Undang-undang Organisasi Masyarakat	2015	60.000,00
126	Buku UU RI No.28 Tahun 2004	2015	38.500,00
127	UUD 1945 & Amandemen Edisi Reshulffle 2015	2015	78.000,00
128	Undang-Undang Peradilan Umum dan PTUN Edisi Lengkap	2015	46.000,00
129	Undang-undang Perkawinan & Administrasi kependudukan,Kewarganegaraan	2015	30.000,00
130	UU tentang Pelayanan Publik & Keterbukaan Informasi Publik	2015	41.000,00

NO	JUDUL BUKU	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)
132	UU Perbendaharaan Negara No.1 tahun 2004	2015	35.000,00
133	Himpunan Peraturan lengkap bangunan gedung dan IMB	2015	31.000,00
134	UU ASN No.5 tahun 2014	2015	96.000,00
135	UU Perdagangan no.7 /2014 & UU Perindustrian no.3/2014	2015	101.000,00
136	UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	2015	63.500,00
137	UU no 40 tahun 2014 ttg Perasuransian	2015	103.000,00
138	Buku Hukum Pengadaan Tanah	2015	90.000,00
139	hukum pengadaan tanah	2015	90.000,00
140	undang undang perkawinan dan administrasi kependudukan	2015	60.000,00
142	Inspirasi Tanpa Mengguri	2016	107.000,00
143	Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan BPJS	2016	65.000,00
144	Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa	2016	84.000,00
145	Men Are From Mars,Women Arefrom Venus	2016	96.000,00
146	Hukum Pemerintahan Desa	2016	96.000,00
147	Undang-undang Perindustrian RI Nomor 3 Tahun 2014	2016	30.600,00
148	Undang-undang Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2012	2016	31.000,00
149	Undang-undang Otonomi Daerah Edisi Terbaru	2016	57.000,00
150	Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial	2016	84.000,00
151	Undang-undang Perbendaharaan Negara RI Nomor 1 Tahun 2014	2016	35.000,00
152	Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial	2016	84.000,00
153	Undang-undang PILKADA Edisi Terbaru	2016	33.500,00
154	Undang-undang PILKADA Edisi Terbaru	2016	33.500,00
155	Undang-undang PILKADA Edisi Terbaru	2016	33.500,00
156	Undang-undang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota Edisi Terbaru	2016	45.000,00
157	Peraturan Menteri Dalam Negeri Pembentukan Hukum Daerah	2016	44.500,00

NO	JUDUL BUKU	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)
158	Peraturan Menteri Dalam Negeri Pembentukan Produk Hukum Daerah	2016	44.500,00
159	ISIS DAN ILLUMINATI	2016	79.000,00
160	Paran Pangan DPRD	2021	93.000,00
161	Optimali Fungsi DPRD	2021	86.000,00
162	Peningkatan Fungsi DPRD	2021	88.000,00
163	Penguatan Pengawasan DPRD	2021	89.000,00
164	Kepemimpinan yang Efektif	2021	161.800,00
166	Seni Berbicara	2021	121.900,00
167	Berpikir dan Berjiwa Besar	2021	111.600,00
168	Pengadaan Barang dan Jasa	2021	65.000,00
169	Undang-undang ASN	2021	49.500,00
170	Undang-undang PEMILU	2021	110.000,00
171	Membangun Hubungan	2021	49.400,00
172	Undamg-Undang No 23 Tahun 2014	2022	250.000,00
173	Optimalisasi Fungsi Penganggaran	2022	90.000,00
175	Peningkatan Fungsi DPRD	2022	85.000,00
TOTAL			14.711.300,00

5.4.1.2.5 Akumulasi Penyusutan

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023(Rp)
(5.870.120.383,00)	(5.630.863.489,00)

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2024 sebesar (Rp5.870.120.383,00) sedangkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp5.630.863.489,00).

Berikut adalah rincian Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan :

Tabel 5.20 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin	Saldo 31-12-2024 (Rp)	Saldo 31-12-2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.863.491.879,00)	(5.625.663.489,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.400.000,00)	(5.200.000,00)
JUMLAH	(5.630.863.489,00)	(5.630.863.489,00)

5.4.1.1. Aset Lainnya

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)
174.342.909,00	168.739.992,00

Jumlah tersebut merupakan aset lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2024 sebesar Rp174.342.909,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp168.739.992,00.

5.4.2 Kewajiban

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)
0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

5.4.2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)
0,00	0,00

Utang PFK per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 (Nihil) dan Jumlah tersebut berupa Pajak (PPN dan PPh) yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.3.1 Ekuitas Dana

31-12-2024 (Rp)	31-12-2023 (Rp)
2.367.100.530,00	725.024.597,00

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua per

31 Desember 2024 yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang sebesar Rp2.367.100.530,00 nilai Ekuitas Dana Tahun 2023 sebesar Rp725.024.597,00.

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Merupakan salah satu SKPD di Lingkup Kabupaten Sabu Raijua yang beralamat di Jalan El Tari-Seba Km.7 Menia, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua. Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2010. Dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua dengan di kepalai oleh seorang Sekretaris DPRD dengan jenjang pangkat Pembina Utama Muda dan golongan ruang IV/c (Eselon II/b), yang membawahi:

- a. 1(satu) Sekretaris DPRD dengan pangkat
- b. 3 (Tiga) Kepala Bagian dengan pangkat Pembina Tingkat 1 dan Golongan Ruang IV/b.
- c. 1 (Satu) Kepala Sub Bagian dengan pangkat Penata Tingkat 1 dan Golongan Ruang III/c
- d. 2 (Dua) Fungsional dengan pangkat Penata Tingkat 1 dan Golongan Ruang III/d
- e. 1 (Satu) Fungsional dengan pangkat Penata Tingkat 1 dan Golongan Ruang III/d
- f. 5 (Lima) Staf dengan pangkat Penata Muda Tingkat I dan Golongan Ruang III/b.
- g. 2 (Dua) Staf dengan pangkat Penata Muda dan Golongan Ruang III/a.
- h. 1 (Satu) Staf dengan pangkat Pengatur Tingkat I dan Golongan Ruang II/d.
- i. 1 (Satu) Staf PPPK dengan pangkat Penata Muda golongan 9
- j. 19 (Sembilan Belas) Tenaga Kontrak Daerah.

Pengisian Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang ada saat ini:

Tabel 6.1. Data Pegawai

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol.Ruang	Jabatan	Pendidikan	Asal Pegawai
(1)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Salmon D Pellokila,SP 19710306 199503 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Sekretaris DPRD	S1,Ilmu Pertanian	Kabupaten Kupang
2.	Yohanis Bibu Huki Lena,S.Pt / 19680608 199503 1 003	Pembina Tk.1, IV/b	Kepala Bagian Umum	S1, Ilmu Pertanian	Kabupaten Sabu Kupang
3.	Melania Radjah,SE / 19770507 200501 2 017	Pembinaa Tk 1 IV/b	Kepala Bagian Keuangan	S1 / Ilmu Ekonomi Akuntansi	Kabupaten Sabu Kupang
4.	Robert Hendrik, S.Pt / 19671227 199903 1 010	Pembinaa Tk 1 IV/b	Kepala Bagian Risalah dan Persidangan	SI / Ilmu Pertanian	Kabupaten Sabu Raijua
5.	Paulina S.M Fongodhosa,SE/ 19750312 201001 2 013	Penata Tk 1, III/d	Analisis Keuangan	S1, Ilmu Ekonomi	Kabupaten Sabu Raijua

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol.Ruang	Jabatan	Pendidikan	Asal Pegawai
(1)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)
6.	Vecky Petra Puas Gay,SE / 19761121 201001 1 008	Penata Tk.1, III/d	Analisis Keuangan	S1, Ilmu Ekonomi	Kabupaten Sabu Raijua
7	Kristoforus Nggino, S.Pd Nip. 19800929 201001 1 024	Penata Tingkat I/IIId	Pengelola Data dan Informasi Penata Tk.I (III/d)	SI, Ilmu Pendidikan	Kabupaten Sabu Raijua
8.	Janti Hendriana Moru, SE NIP. 19780115 201406 2 001	Penata III/d	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga	S1, Ilmu Ekonomi	Kabupaten Sabu Raijua
9	Jandri Osias Modok,S.Kom/ 19870110 20201212 1 002	Penata Muda III/b	staf	S1 Ilmu Komputer	Kabupaten Sabu Raijua
10	Estyn Feministalia Bunga,SE/ 19880216 202012 1 002	Penata Muda III/a	staf	S1 Ilmu Ekonomi	Kabupaten Sabu Raijua
11	Mariane I.Y Nassa,S.Ikom/ 19980620 202012 2 002	Penata Muda III/a	staf	S1 Ilmu Komunikasi	Kabupaten Sabu Raijua
12	Jublina Maryance Siokain, A.Md Nip. 19821031 201101 2 010	Penata Muda TK I / (III b)	Pengelola Penanganan Perkara	D3/Politeknik	Kabupaten Sabu Raijua
13	Kristin Yuliana Ara Riwu,M.Pd NIP. 19910420 201903 2 002	Penata Muda TK 1/(III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	S2/ Ilmu Pendidikan	Kabupaten Sabu Raijua
14	Septiana M.P Bire 19940908 202203 2 002	Penata Muda III/a	staf	S1 Akuntansi	Kabupaten Sabu Raijua
15	Kristian Imanuel Moy,S.I.P / 19930408 201403 1 002	Penata Muda III/a	Staf	S1 Ilmu Pemerintahan	Kabupaten Sabu Raijua
16	Yonedi Y,Rupidara/ 19760207 201101 1 001	Pengatur II/c	Staf	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
17	Yonas Yeheskiel H Medo Ludji,SH/ 19821215 2023211008	Penata Muda/9	Staf	S1/Imu Hukum	Kabupaten Sabu Raijua
18	Irna A.Kana Lebe	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
19	Titus M Hadi Ratu	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
20	Dominominius Bessie	-	Tenaga Kontrak	SI/ Ilmu Pendidikan	Kabupaten Sabu Raijua
21	Ocy Kore Udju	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
22	Benediktus Kale Dipa	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
23	Marviance Mone Udju	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol.Ruang	Jabatan	Pendidikan	Asal Pegawai
(1)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)
24	Victor I.Wadu	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
25	Mesakh Riwu	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
26	Gabriel Bangngu	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
27	Heprianto A.Dira Tome	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
28	Rihi Dida	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
29	Fabianus Baki Boni	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
30	Denilson Tuka	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
31	Rina Mariana Tuka	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
32	Anova Kurniati Kore Tome	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
33	Asrilyanti Hili Buru	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
34	Lili Nova Djeni	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
35	Marlissh W.Muskita	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua
36	Samira B.A.Alkatiri	-	Tenaga Kontrak	SMA / Sederajat	Kabupaten Sabu Raijua

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini dibuat sebagai penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan satu kesatuan Laporan Keuangan dalam pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024.

Seba, 31 Desember 2024
. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sabu Raijua,

Salmon Daniel Pellokila,SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710306 199503 1 003